



### Transisi Energi G20

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat peluncuran Transisi Energi G20, Kamis (10/2/2022). Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.

### TRANSISI ENERGI G20

## Indonesia Ajak Dunia Capai Kesepakatan Global untuk Percepatan Transisi Energi

JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meluncurkan Transisi Energi G20. Forum ini diharapkan menjembatani fokus Indonesia mendorong negara maju dan berkembang pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi serta memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan.

Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.

"Forum Transisi Energi diharapkan akan menghasilkan hasil persidangan G20 yang lebih konkret guna memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan, serta transisi energi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan," kata Arifin dalam sambutannya secara virtual di Jakarta, Kamis (10/2).

Pada pilar transisi energi, imbuh Arifin, akan diangkat tiga isu prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan. "Dengan urgensi tiga isu ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi," jelasnya.

Melalui forum ini pula, Indonesia mampu menghimpun komitmen global yang lebih kuat dalam rangka mencapai target global pada akses energi yang ditargetkan Agenda 2030 sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Hasil Utama atau *Lighthouse Deliverable* inilah yang diharapkan oleh Presidensi Indonesia sebagai tindak lanjut aksi-aksi pasca-COP26 dan Presidensi G20 sebelumnya, dalam rangka mencapai Karbon Netral, yang Indonesia telah targetkan pada 2060, atau lebih cepat lagi dengan dukungan riil dari komunitas internasional," jelas Arifin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden RI menekankan aksi transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan serta berdampak negatif pada sosial-ekonomi masyarakat.

"Perubahan paradigma pasti akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis, dan lainnya. Jadi, kita ingin yang berkeadilan, yang bebannya berat harus dibantu, yang sudah siap silahkan jalan sendiri selagi membantu yang belum mampu. Ini harus didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat. Ini yang akan kita bangun di G20 Indonesia. Inilah yang kita maksud dengan global deal," ungkap Luhut.

Sebagai bagian dari implementasi transisi energi di Indonesia, pemerintah akan terus mendorong lahirnya industri yang lebih hijau dan mendorong kontribusi swasta maupun filantropi melakukan pendanaan inovatif.

Selanjutnya, Menteri ESDM pun mengajak semua pihak untuk turut serta berkolaborasi aktif menyukseskan Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tema utama, yaitu *Recover Together, Recover Stronger*. "Menjadi Presidensi G20 merupakan kesempatan yang sangat langka bagi Indonesia. Marilah kita semua bersama-sama menyukseskan Forum Transisi Energi G20 2022 yang terdiri dari Rangkaian Pertemuan *Energy Transitions Working Group* (ETWG) dan *Energy Transition Ministerial Meeting* (ETMM), serta rangkaian *Virtual Webinar Events*, *Investment Forum*, dan *parallel events* lainnya," harapnya. (rap)



Arifin Tasrif

# PLN Pasok Listrik 75 MW ke Smelter Feronikel Milik Antam

JAKARTA - PT PLN (Persero) siap memasok listrik untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara sebesar 75 megawatt (MW) selama 30 tahun ke depan.

Oleh Euis Rita Hartati

Sinergi kedua BUMN ini ditandai dengan penandatanganan *Head Of Agreement* (HOA) antara PLN dan Antam di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (9/2).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN bahkan menyiapkan kapasitas lebih besar yaitu 111 MW untuk menjamin keandalan pasokan dan mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan *smelter* Antam ke depan.

Rencananya, pasokan listrik ini akan terbagi menjadi dua tahap. Pertama, selama enam bulan ke depan PLN akan memasok kebutuhan listrik ANTAM sebesar 51 MW. Kedua, setelahnya PLN selama 12 bulan akan menyelesaikan pasokan listrik sebesar 60 MW untuk keperluan listrik sepenuhnya *smelter* feronikel.

"Kapasitas 111 MW ini *dedicated* untuk mendukung kebutuhan Antam hingga jangka panjang. Silakan jika ke depan Antam membutuhkan tambahan suplai listrik, kami juga sudah siap," ujar Darmawan, dalam keterangan tertulis yang diterima *Investor Daily*.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik tersebut, PLN akan mendatangkan dua mesin pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) *dual fuel system* dari wilayah Sumatera Selatan sebesar 51 MW dan Jambi sebesar 60 MW untuk dibawa ke Halmahera Timur sehingga bisa mengoptimalkan pasokan listrik untuk *smelter* Antam.

"Ada beberapa daerah yang saat ini oversupply secara pasokan sehingga pembangkit tersebut saat ini *under-utilize*. Sehingga ini bisa kita maksimalkan pemanfaatannya untuk *smelter* feronikel milik Antam di Halmahera Timur," ujar Darmawan.

Dia mengatakan, kolaborasi dan



Darmawan Prasodjo

sinergi ini mampu memperkuat ekosistem BUMN. Apalagi, *smelter* yang dibangun Antam ini merupakan amanat pemerintah untuk menggenjot produk hilirisasi mineral.

"Kita semua tahu bahwa pembangunan *smelter* ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Tentunya *multiplier effect*-nya sangat banyak dari dorongan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pengembangan wilayah" ujar Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama Antam Nicolas Kanter menjelaskan, *smelter* merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Dengan dukungan listrik PLN, *smelter* yang sudah selesai dibangun ini akan segera beroperasi penuh. "Dengan adanya sinergi bersama PLN, *smelter* ini akan beroperasi pada 2022 ini," ujar Nico.

Nico berharap proses pembangunan dan penyambungan listrik akan dilakukan secara cepat, tepat dan andal. "Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi kepada negara dan memberikan manfaat

“Kapasitas 111 MW ini *dedicated* untuk mendukung kebutuhan Antam hingga jangka panjang. Silakan jika ke depan Antam membutuhkan tambahan suplai listrik, kami juga sudah siap.”

### Darmawan Prasodjo

Direktur Utama PLN

lebih terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasi pabrik," ujar Nico.

Nico berharap sinergi ini bisa mendorong percepatan hilirisasi mineral. Peran aktif BUMN dalam memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara bisa segera terealisasi.

"Kami meyakini dengan sinergi yang baik antara Antam dan PLN, upaya percepatan hilirisasi mineral terutama dalam kaitannya dengan komoditas nikel dapat terlaksana segera," ujar Nico.

### Pembelian Batu Bara

Sementara itu, PLN menerapkan sentralisasi kontrak pembelian batu bara demi menjaga keandalan pasokan listrik ke pelanggan. Seluruh kontrak pembelian batu bara yang sebelumnya dilakukan PLN Batubara bakal dialih-

kan ke PLN sebagai induk usaha.

"Untuk optimalisasi, PLN melakukan pemusatan dalam penyediaan batu bara sehingga seluruh pembelian batu bara terkonsolidasi di PLN. Kebijakan ini akan mendorong efektivitas manajemen batu bara," ungkap Direktur Energi Primer PLN Hartanto Wibowo.

Tak hanya itu, PLN juga melakukan kontrak langsung dengan perusahaan tambang untuk menjamin keandalan pasokan batu bara. Kontrak PLN Batubara yang sebelumnya didominasi kontrak dengan trader telah diubah sehingga penambang menjadi pihak yg terikat dlm kontrak. PLN maupun PLN Batubara sudah tidak berkontrak lagi dengan trader.

Selain itu, PLN juga melakukan perubahan kontrak yang semula bersifat jangka pendek juga diubah menjadi kontrak jangka panjang. "Perubahan kontrak ini dilakukan untuk menjamin kepastian pasokan batu bara secara jangka panjang, baik dari sisi volume juga jadwal pengiriman," tambah Hartanto.

PLN juga memastikan proses pembayaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok batu bara ini lebih cepat. "Untuk memperbaiki bisnis dan rantai pasok. Kami ubah mempercepat tagihan operasi dan transportasi, maksimal 14 hari setelah dokumen penagihan diterima secara lengkap dan benar oleh PLN, dari sebelumnya sekitar 90-120 hari," ungkapnya.

Kecepatan pembayaran ini berlaku untuk pengadaan kapal, tongkang, bongkar muat. Juga pembayaran batubara kepada penambang. Saat ini, PLN memastikan pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU telah sesuai rencana dengan rata-rata pasokan mencapai 15 Hari Operasi (HOP). Dengan terpenuhinya batu bara tersebut PLN optimis dapat menjaga keandalan suplai listrik ke pelanggan.

## Pemerintah Diminta Naikkan Kompensasi untuk Pertalite

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menaikkan kompensasi kepada Pertamina untuk jenis BBM Pertalite dari 50% sebagaimana diatur dalam Perpres 117/2021, menjadi 100%. Pemasnya, konsumsi masyarakat untuk jenis BBM ini semakin meningkat, sementara harga jual yang diberlakukan di bawah nilai keekonomian.

"Kenaikan kompensasi ini bisa dilakukan dengan pertimbangan konsumsi BBM Ron 88 (Premium) sudah sangat minim sekali. Bahkan BBM Ron 88 sudah seharusnya dihapuskan. Hal ini mengingat tidak sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca," kata Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan di Jakarta, Kamis (10/2).

Menurut dia, saat ini hanya 7 negara

yang masih menggunakan BBM Ron 88 yaitu Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan dan Indonesia. "Jadi sudah sepatutnya tidak dipasarkan lagi di Indonesia," pungkas Mamit.

Harga minyak dunia saat ini yang mencapai nilai tertinggi dalam sejak Oktober 2014 yang lalu yaitu diangka US\$ 94 per barel untuk jenis Brent dan WTI di angka US\$ 92.31 per barel ini bisa dipastikan akan memberikan tekanan kepada Pertamina terutama sektor hilir. Hal ini disebabkan Pertamina tidak bisa melakukan penyesuaian harga BBM Umum mereka yaitu Pertamina dan Pertalite sejak Februari 2020, sementara harga minyak dunia terus mengalami kenaikan mulai Juni 2020. Pertamina bisa mengalami kerugian yang cukup dalam.

Di sisi lain, pemerintah, kata dia, terus berupaya untuk memenuhi komitmen yang di sepakati dalam Paris Agreement pada 2015 atau COP 21 pada Desember 2015 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030 yang akan datang.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah diterbitkan Permen LHK No 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4. Salah satu bleed dalam Permen tersebut adalah penggunaan BBM dengan minimal RON 91 dan CN 51.

"Kebijakan ini memang belum berjalan seutuhnya mengingat saat ini konsumsi bbm di Indonesia masih ada yang menggunakan Ron 88 dan Ron 90. Namun, perlahan

tapi pasti penggunaan BBM Ron 92 terus mengalami peningkatan," papar Mamit.

Hal ini bisa dilihat, penggunaan BBM Pertamina tahun 2021 mencapai 20% dari total konsumsi gasoline, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya di angka 12% dari total konsumsi gasoline. Dengan demikian, menurut Mamit, kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM dengan ron yang lebih tinggi sudah mulai tumbuh.

Penggunaan bbm RON 92 ke atas, menurut dia, sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat Indonesia. Bahkan dengan hadirnya Pertashop di desa-desa dan penjualan Pertamina meningkat, merupakan indikasi bahwa sampai ke pedesaan pun sudah sadar pentingnya menggunakan BBM RON tinggi. (es)

CIMB NIAGA			
PEMBERITAHUAN			
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019			
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 (selanjutnya disebut Sukuk Mudharabah) bahwa sesuai Perjanjian Penawaran Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ke-10 periode 21 November 2021 s/d 21 Februari 2022, adalah sebagai berikut:			
No	PARAMETER	JUMLAH	
		SERI B	SERI C
1	Portofolio Pembiayaan dengan Akad <i>Musyarabah Mutanasisah</i> (MMQ)		24.326.730.000,000
2	Pendapatan Pembiayaan dari Akad MMQ		149.376.000,000
3	Nilai Sukuk Mudharabah	936.000.000,000	429.000.000,000
4	Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah	19,75%	20,63%
5	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk Mudharabah + Insentif	18.486.000,000	8.848.125.000
6	Tingkat Bagi Hasil Setara (pa)	7,90%	8,25%

Sehubungan dengan hal tersebut, pembayaran pendapatan bagi hasil ke-10 Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 21 Februari 2022.

Jakarta, 11 Februari 2022

EMITEN  
CIMB NIAGA  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

WALI AMANAT  
PermatBank  
PT BANK PERMATA Tbk